



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia pendidikan Indonesia pada saat ini berada dalam sorotan para pengamat pendidikan nasional, seperti yang disampaikan oleh Nanang Fattah bahwa fakta menunjukkan bahwa kinerja guru di Indonesia rata-rata masih rendah dan jauh ketinggalan dibandingkan negara-negara lain. Berbagai kritikan tajam yang berasal dari berbagai sudut pandang terus ditujukan kepada dunia pendidikan nasional dengan berbagai alasan dan kepentingan.<sup>1</sup>

Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pendidikan formal. Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pelaksanaan pendidikan melalui jalur madrasah yang lebih diarahkan pada kegiatan belajar mengajar. Dalam hal belajar mengajar ini, Azhar menyebutkan bahwa:

“Belajar adalah suatu proses yang kompleks terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Belajarpun terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu tanda seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan terjadinya perubahan tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya”.<sup>2</sup>

Sekolah sebagai suatu lembaga Pendidikan menghadapi dua tuntutan yaitu tuntutan dari masyarakat dan tuntutan dari dunia usaha. Hal yang menjadi tuntutan yaitu tentang masalah rendahnya mutu pendidikan dan masalah relevansi terhadap

<sup>1</sup> Fattah, Nanang, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung : Andika, 2000, h. 1.

<sup>2</sup> Arsyad, Azhar. *Media Pembelajaran*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2014. Hal 1

perkembangan kebutuhan masyarakat di era industrialisasi dan globalisasi yang semakin terbuka.

Sejalan tantangan kehidupan global, pendidikan mempunyai peran strategis dalam jaman yang maju, keunggulan suatu bangsa tidak lagi mengandalkan kekayaan alam melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM). Mutu sumber daya manusia (SDM) ditentukan mutu pendidikan, tolak ukur mutu pendidikan didasarkan pada kondisi output dan outcome yang memenuhi syarat dalam menghadapi tuntutan jaman. Untuk mewujudkan mutu pendidikan harus ditunjang oleh komponen pendidikan yang memadai. Komponen-komponen tersebut menjadi masukan (input) untuk diproses sehingga menghasilkan keluaran (output) dan outcome (dampak) yang unggul.

Untuk mewujudkan output yang unggul, baik dan berkualitas dari sebuah pendidikan, maka diperlukan adanya komponen yang mendukung, yang salah satunya adalah kepala sekolah, karena keberadaan kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap semua sumber daya pendidikan yang ada. Berbagai sumber daya pendidikan seperti, sarana dan prasarana, biaya, teknologi, informasi, siswa dan orang tua siswa dapat berfungsi dengan baik apabila guru memiliki kemampuan yang baik pula dalam menggunakan semua sumber daya yang ada.

Pemimpin pendidikan dalam hal ini adalah kepala sekolah sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan, harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk membangkitkan semangat kerja personal. Seorang pemimpin juga harus mampu menciptakan iklim dan suasana yang kondusif, aman, nyaman, tentram,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyenangkan, dan penuh semangat dalam bekerja bagi para pekerja dan para pelajar. Sehingga pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat berjalan tertib dan lancar dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Apabila seorang kepala sekolah tidak bisa mengatur, mempengaruhi, mengajak anggotanya untuk meraih tujuan pendidikan, gagap memanfaatkan peluang yang ada, dan cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang sekedar melaksanakan tugas rutin, maka jangan diharapkan kualitas pendidikan akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika seorang kepala sekolah tersebut memiliki potensi yang cukup baik, maka ia akan cenderung untuk terus meningkatkan organisasi pendidikan di lembaga yang dipimpinnya. Sehingga dengan sendirinya kualitas pendidikan ikut meningkat.

Sesuai dengan Al-quran surat As-Sajdah ayat 24 dijelaskan tentang tugas seorang pemimpin, yaitu:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَلِيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sebagai seorang yang menjadi panutan di lingkungan pendidikan, maka kepala sekolah harus bisa menunjukkan sikap yang bijaksana dengan tidak semena-mena terhadap bawahannya sehingga menjadi panutan dalam menjalankan aktifitas kerja. Dalam Al-Qur'an surat As-Syu'ara' ayat 215 Allah berfirman :

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

Kepala sekolah sebagai edukator pendidik harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya seperti menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat, memberikan dorongan, melaksanakan pembelajaran yang menarik dan lain sebagainya. Demi tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan, kepala sekolah juga harus mampu meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dalam mewujudkan prestasi belajar siswa.<sup>3</sup>

Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah sebagai pendidik yaitu sasaran atau kepada siapa perilaku sebagai pendidik itu diarahkan dan yang kedua bagaimana peranan sebagai pendidik itu dilaksanakan.<sup>4</sup>

Selain itu untuk menunjang keberhasilan yang diharapkan, perlu dipersiapkan kepala sekolah profesional, yang mau dan mampu melakukan perencanaan serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan perubahan. Tidak mudah menjadi kepala sekolah yang profesional, banyak hal yang harus dipahami, banyak masalah yang harus dipecahkan dan banyak pula strategi yang harus dikuasai. Dalam hal ini Allah swt. telah berfirman dal surat Al-Anbiya ayat 73, yaitu:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

<sup>3</sup> Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung : Rosda, 2009, h. 98-99.

<sup>4</sup> Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan situasi dan kondisi pendidikan yang ada, maka wujud nyata dari komitmen desentralisasi pendidikan adalah dengan diberlakukannya suatu model pengelolaan pendidikan yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah/sekolah (MBS/MBM), yaitu suatu model pengelolaan pendidikan yang lebih terbuka, lebih melibatkan banyak pihak serta mengakar kepada potensi dan sumber daya yang tersedia di daerah. Model pengelolaan pendidikan dengan MBM telah dikuatkan kedudukannya dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa; “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/sekolah”.<sup>5</sup>

Pada konteks otonomi daerah dan disentralisasi pendidikan, keberhasilan atau kegagalan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada guru, kepala sekolah, dan pengawas, karena tiga figure tersebut merupakan kunci yang menentukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi sekolah. Dalam posisi tersebut, baik buruknya komponen sekolah sangat ditentukan oleh kualitas guru, kepala sekolah dan pengawas, tanpa mengurangi arti penting tenaga pendidikan yang lain. Implementasi desentralisasi pendidikan menuntut kepala sekolah dan pengawas menunjukkan profesionalitasnya, mereka dituntut untuk mengembangkan sekolah yang efektif dan produktif, dengan penuh kemandirian dan akuntabilitas. Kepala sekolah dan pengawas harus mampu mengembangkan berbagai potensi sekolah sehingga mampu mencari dan menemukan makna dari

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Qanon Publishing, 2004), h. 41.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Sukses tidaknya pendidikan dan pembelajaran disekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola dalam mengelola setiap komponen sekolah (who is behind the school). Kemampuan kepala sekolah tersebut terutama berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap manajemen dan kepemimpinan, serta tugas yang dibebankan kepadanya, karena tidak jarang kegagalan pendidikan dan pembelajaran disekolah disebabkan oleh kurangnya pemahaman kepala sekolah terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berhasil tidaknya suatu sekolah dalam mencapai tujuan serta mewujudkan visi dan misinya terletak pada bagaimana manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah, khususnya dalam

menggerakkan dan memberdayakan berbagai komponen sekolah. Dalam prosesnya, interaksi berkualitas yang dinamis antara kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi, dan peserta didik memainkan peran sangat penting, terutama dalam penyesuaian berbagai aktivitas sekolah dengan tuntutan globalisasi, perubahan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan situasi, kondisi, dan lingkungannya. Kesemuanya ini sangat menuntut kompetensi dan profesionalisme kepala sekolah, untuk memungkinkan terciptanya interaksi berkualitas yang dinamis.<sup>6</sup>

Ketercapaian tujuan lembaga pendidikan sekolah sangat bergantung dari kecakapan dan kebijakan kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah merupakan pejabat profesional dalam mengelola organisasi sekolah sekaligus bertugas mengatur dan mengelola semua sumber, organisasi dan bekerjasama dengan komite sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga lain serta stakeholder yang ada.

Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan dan mengelola sekolah harus memahami kebutuhan sekolah yang dipimpinnya termasuk kebutuhan guru, murid dan warga sekolah. Kepala sekolah profesional akan selalu member motivasi seluruh komponen warga sekolah dapat meningkat berkembang baik. Kepala sekolah dan guru sebagai tenaga sebagai tenaga kependidikan yang profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar, dan metode, akan tetapi mampu memotivasi peserta didik untuk memiliki keterampilan dan wawasan luas terhadap pendidikan.

---

<sup>6</sup> E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Banyak faktor penghambat tercapainya kualitas kepemimpinan kepala sekolah jika dilihat dari rendahnya kinerja kepala sekolah. Berdasarkan pengalaman empiric menunjukkan bahwa rata-rata kepala sekolah kurang memiliki kemampuan akademik, kurang motivasi diri, kurang semangat dan disiplin kerja, serta memiliki wawasan pendidikan sempit. Fenomena ini disebabkan karena faktor proses penyaringan kurang memenuhi kompetensi, kurang procedural, kurang transparan, banyak nuansa/muatan, tidak kompetitif serta faktor-faktor internal dan eksternal kepala sekolah dapat menjadi penghambat tumbuh kembangnya menjadi kepala sekolah yang professional. Rendahnya profesionalitas berdampak rendahnya produktivitas kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Di negara maju, kualitas sumber daya manusia adalah segala-galanya oleh karena itu masyarakat akan bersaing untuk mencari sekolah yang terbaik bagi putra-putrinya. Sekolah yang tidak mampu menunjukkan kualitas terbaiknya akan ditinggalkan oleh masyarakat (orang tua).

Meningkatkan kualitas pendidikan (sekolah) tidaklah mudah, untuk mencapai kualitas yang baik tidak selalu identik dengan besarnya dana yang dikeluarkan, letak sekolah di desa ataupun dikota, Negeri ataupun swasta namun sangat ditentukan oleh bagaimana sekolah memberikan kualitas pelayanan kepada peserta didik sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas.

Pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa, telah diakui dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan ayat (3) juga menyatakan bahwa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.<sup>7</sup> Oleh karena itu seluruh komponen bangsa baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah sendiri bertanggung jawab mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Hal ini menjadi salah satu tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 alinea 4.<sup>8</sup>

Kondisi lembaga pendidikan (sekolah) di Negara kita saat ini masih ada beberapa permasalahan klasik yaitu kurangnya sarana prasarana sekolah. Keadaan gedung sudah rusak, mutu tenaga pendidik belum memenuhi kompetensi dan kebijakan-kebijakan kurang produktif. Disisi lain sangat menggembirakan yaitu bahwa kesadaran masyarakat semakin meningkat akan pentingnya pendidikan yang berkualitas.

Dengan semangat desentralisasi pendidikan yang semakin menguat, sekolah menjadi leluasa bergerak mengelola sumber daya yang ada sehingga mutu dapat ditingkatkan. Apalagi dengan diterapkannya suatu alternatif model pengelolaan sekolah dengan manajemen berbasis sekolah, akan menjadikan kompetisi antar sekolah semakin nampak.

Berakaitan dengan hal tersebut, tujuan pendidikan dapat tercapai apabila semua komponen pendidikan memenuhi persyaratan. Dari beberapa komponen pendidikan, yang paling berperan kepala sekolah. Kepala sekolah yang bermutu akan mampu menjawab tantangan perubahan jaman yang semakin cepat. Dimasa

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal 31 ayat 1 dan 3

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, alinea 4

mendatang permasalahan pendidikan semakin kompleks, sehingga menuntut kepala sekolah untuk selalu melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kompetensi seluruh komponen sekolah.

Peningkatan mutu pendidikan melalui standarisasi dan profesionalisasi yang sedang dilakukan dewasa ini menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen system pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah menekankan bahwa pengambilan kebijakan berpindah dari pemerintah pusat (*top government*) pemerintahan daerah (*district government*), yang berpusat di pemerintahan kotadan kabupaten. Dengan demikian, kewenangan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah berada di puncak Pemerintah Kota dan Kabupaten, sehingga implementasinya akan diwarnai oleh *political will* pemerintah daerah, yang dituangkan dalam peraturan daerah (perda). Dalam hal ini, tentu saja yang paling menentukan adalah Bupati/Walikota, dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya. Oleh karena itu, merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas Pendidikan di daerahnya; meskipun tidak selamanya demikian, karena dalam pelaksanaanya tidak sedikit penyimpangan dan salah penafsiran terhadap kebijakan yang digulirkan, sehingga menimbulkan berbagai kerancuan bahkan penurunan kualitas.

Masalah yang berkaitan dengan jaminan mutu pendidikan. Dengan mendekatkan kastemer pendidikan eksternal (khususnya orang tua dan masyarakat), aspirasi mereka akan lebih terakomodasi, demikian pula kontrol

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntabilitas bias dilakukan secara wajar. Masalahnya bagaimana menjamin disvaritas kualitas yang disebabkan oleh munculnya kriteria lokal. Lebih lanjut, perlu dipikirkan dan di sosialisasikan secara efektif Standar Nasional Pendidikan (SNP/PP No. 19/2005) kepada seluruh pemerintah daerah dan satuan pendidikan di setiap daerah, agar mereka mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif dalam konteks nasional, bahkan internasional. Faktor yang cukup berpengaruh dalam praktik desentralisasi adalah ketersediaan dana yang memadai. Untuk kepentingan tersebut, bagaimana mendorong masyarakat agar dapat berperan aktif dalam masalah pendanaan ini.

Sekolah Islam Terpadu di Kecamatan Tembilahan Kota terdapat beberapa SDIT yang semuanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan, berdasarkan observasi penulis di lapangan juga ditemukan indikasi yang menunjukkan bahwa peran kepala terhadap kinerja sebagian guru masih kurang maksimal, hal ini ditunjukan seperti: belum mampu memberdayakan seluruh masyarakat terhadap keamanan guru dalam bekerja, tidak memberitahu ketidakhadiran, datang kesekolah tanpa persiapan mengajar, guru hanya sebatas mengajar sebagai kewajibannya tanpa ada bimbingan moral kepada siswadan juga antara guru dan kepala sekolah/sekolah berkomunikasi hanya pada waktu penandatanganan Dp3, RPP, Silabus dan administrasi pendidikan lainnya. Disisi lain Kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya mampu menggerakkan para guru, murid dan warga sekoah untuk selalu meningkatkan kemampuannya sehingga hasil prestasi akademik dan non akademik sangat menonjol. Kepala sekolah memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah Dasar Islam Terpadu disamping mengembangkan Kurikulum Nasional juga mengembangkan Kurikulum muatan lokal Propinsi, Muatan lokal kabupaten, muatan lokal sekolah masih ditambah kurikulum berbasis agama yang menjadi ciri khas sekolah. Adapun keadaan gurunya 80% masih muda yang notabene masih perlu banyak pengalaman mengajar dan banyak wiyata bhakti.

Kondisi jumlah siswa banyak dengan kapasitas setiap ruangan antara 29-35 siswa dengan semua kelas paralel membuat proses pembelajaran yang cukup menantang. Adapun standar maksimal tiap kelas hanya 28 anak (SNP). Jumlah siswa yang kian besar untuk tingkat kecamatan dan berasal dari berbagai daerah tidak hanya dari satu kecamatan melainkan sampai luar kecamatan dan luar kabupaten.

Observasi tersebut juga dikuatkan oleh wawancara penulis dengan Bapak Khaidir yang mengatakan “Banyak guru kurang berhasil dalam mengajar dikarenakan merekakurang termotivasi untuk mengajar sehingga berdampak terhadap menurunnya kinerja guru. Untuk itu diperlukan peran kepala sekolah sebagai supervisor dapat memberi bantuan, bimbingan, ataupun layanan kepada guru dalam menjalankan tugas maupun dalam memecahkan hambatannya dan memotivasi para guru untuk meningkatkan kinerjanya”.

- a. Kebanyakan kepala sekolah belum punya andil dalam perencanaan keputusan.
- b. Kehadiran dan fungsi kepala sekolah kurang menonjol bagi guru, siswa serta masyarakat yang disekitarnya. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa kepala sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu badan yang lebih berfungsi sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan atau badan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

justifikasi belaka.<sup>9</sup>

- c. Kepala sekolah masih belum mampu menciptakan suasana keterbukaan dan kebersamaan kepada guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru di sekolah.

Kalau peran dan fungsi kepala sekolah di tata dengan rapi, diimplementasikan program tersebut dengan memberikan baik, maka fenomena peningkatan mutu pendidikan tersebut tidak akan muncul, namun karena adanya kesenjangan inilah, maka hal tersebut perlu penanganan secara khusus. Sehubungan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam bentuk Tesis dengan judul Sehubungan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam bentuk Tesis dengan judul : ***Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Di Kecamatan Tembilahan Kota.***

### B. Penegasan Istilah

1. Peran adalah merupakan terjemahan dari kata “function”, “job”, atau “work”. menyimpulkan bahwa peran pemimpin menurut teori klasik meliputi (1) Perencanaan (2) Pengorganisasian (3) dan Pengendalian.
2. Kepala sekolah adalah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satu sekolah.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Bapak Muhammad Yani, S.Ag. M.Pd.I, Kepala Sekolah di SDIT Insan Rabbani, Wawancara Tanggal 18 Maret 2018.

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 36 ayat 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Mutu adalah keadaan (lebih) unggul; keutamaan; kepandaian (kecakapan, kebaikan, kekuatan, dsb) yg lebih dari pada yg lain.<sup>11</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Mutu Pendidikan disini adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku.

### **C. Permasalahan**

#### **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena-fenomena diatas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- a. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Tembilahan Kota.
- b. Implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Tembilahan Kota.
- c. Kiat pelaksanaan peran yang diberikan oleh kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Tembilahan Kota.
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Tembilahan Kota.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

## 2. Batasan Masalah

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalahnya, hal ini dimaksudkan agar pembahasannya dapat mengenai sasaran dan tidak mengambang. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah tentang “Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Tembilahan Kota”.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

- Bagaimanakah peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Tembilahan Kota?
- Faktor-faktor apa sajakah yang menunjang dan menghambat peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Tembilahan Kota?

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Tembilahan Kota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menunjang dan menghambat peran kepalasekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Tembilahan Kota.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Tembilahan Kota”, dan penelitian ini sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.
- b. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan memperoleh bekal pengetahuan tentang kontribusi peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan
- c. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam bidang manajemen sumber daya manusia.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen pendidikan.